

Proporsi Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Serta Menunjukkan Ada Tidaknya *Flypaper Effect* di Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2017-2019

Aril Yanuar Lisprastyo Wibowo^{1*} dan Sugeng Widodo²

^{1,2}Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji proporsi dana perimbangan dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah serta menunjukkan ada tidaknya flypaper effect di kabupaten/kota Jawa Timur Tahun 2017-2019. Pengumpulan data dan informasi secara langsung diperoleh melalui instansi dan lembaga yang berhubungan dengan penelitian ini. Sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2017-2019. Teknik analisis untuk menguji hipotesis menggunakan regresi data panel dengan menguji flypaper effect yaitu dengan cara membandingkan nilai DAU dengan PAD, jika nilai DAU > PAD maka menunjukkan adanya flypaper effect. Jika sebaliknya atau sama nilainya antara DAU dengan PAD maka tidak ada flypaper effect. Berdasarkan uji t pada uji regresi linier berganda yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja daerah, Dimana hasil uji rata-rata menunjukkan bahwa nilai rata-rata DAU sebesar Rp. 380.779.789.000 dan Nilai PAD sebesar Rp. 59.496.296.000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai DAU lebih besar dari nilai PAD (DAU > PAD), maka ada Flypaper effect.

Kata kunci: *Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Daerah, Flypaper effect*

Abstract

This study aims to examine the proportion of balancing funds and regional original revenues and show that there is no flypaper effect in the districts/cities of East Java in 2017-2019. Collecting data and information directly obtained through agencies and institutions related to this research. The data source was obtained from the Central Statistics Agency (BPS) of East Java Province. Data collection in this study is to collect reports on the Realization of Regency/City Regional Revenue and Expenditure Budgets in East Java Province from 2017-2019. The analysis technique to test the hypothesis uses panel data regression by testing the flypaper effect, namely by comparing the value of DAU with PAD, if the value of DAU > PAD then indicates the existence of a flypaper effect. If the opposite or the same value between DAU and PAD, then there is no flypaper effect. Based on the t-test on the multiple linear regression test that has been carried out, it can be seen that the General Allocation Fund (DAU) and Regional Original Income (PAD) affect regional spending, where the average test results show that the average value of DAU is Rp. 380,779,789,000 and the PAD value is Rp. 59,496,296,000. This shows that the DAU value is greater than the PAD value (DAU > PAD), so there is a Flypaper effect

Keywords : *General Allocation Fund (DAU), Regional Original Income (PAD), Regional Expenditure, Flypaper effect*

Pendahuluan

Dalam Undang- Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014, seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia diberikan otonomi yang luas oleh pemerintah pusat untuk membantu pengembangan masing-masing daerah termasuk dalam bidang keuangan. Dalam pasal 1 ayat 6 dijelaskan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alasan diadakan otonomi daerah didasarkan pada suatu asumsi bahwa hal-hal mengenai urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan oleh daerah itu sendiri, sangat tepat diberikan kebijakan otonomi sehingga setiap daerah mampu dan mandiri untuk memberikan pelayanan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah. Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan atau mengoptimalkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian suatu daerah (Mardiasmo, 2002). Dengan adanya otonomi daerah pemerintah daerah dituntut dapat melaksanakan fungsi dan perannya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Salah satu kewenangannya adalah mengatur keuangan daerah itu sendiri. Dalam penyelenggaraannya, pemerintah daerah juga mendapatkan bantuan transfer dana dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan fiskal antarpemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh provinsi.

Dana transfer dari pemerintah pusat diharapkan secara efektif dan efisien digunakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kebijakan penggunaan dana tersebut sudah seharusnya pula secara transparan dan akuntabel. Berdasarkan desentralisasi maka pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah agar dapat menjadi sumber dana utama pemerintah daerah untuk membiayai operasi utama sehari-hari. Permasalahan yang terjadi saat ini, pemerintah daerah terlalu menggantungkan alokasi dari pemerintah pusat untuk membiayai belanja daerah dan pembangunan tanpa mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah (Wulansari, 2015). Kuncoro (2007) menyebutkan bahwa PAD hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling besar 20%. Permasalahan yang muncul akibat ketergantungan pemerintah daerah kepada dana transfer dari pemerintah pusat tersebut memicu terjadinya fenomena flypaper effect pada keuangan pemerintah daerah. Fenomena flypaper effect merupakan suatu kondisi yang terjadi saat pemerintah daerah merespon belanja lebih banyak dengan menggunakan dana perimbangan yang diprosikan dengan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil untuk kepentingan belanja daerah daripada menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fenomena flypaper effect membawa implikasi lebih luas bahwa transfer akan meningkatkan belanja pemerintah daerah yang lebih besar daripada penerimaan transfer itu sendiri (Turnbull dalam Kuncoro 2007). Flypaper effect itu sendiri merupakan respon yang tidak simetri atau asimetris terhadap peningkatan dan penurunan penggunaan dana transfer dari pemerintah pusat, Tresch (2002) dalam Wulansari (2015) menyatakan bahwa dana transfer tersebut diberikan untuk jangka waktu tertentu dengan indikasi adanya pihak yang memperoleh keuntungan dari penerimaan transfer (grants) yang cenderung meningkat. Dengan kata lain, terjadinya flypaper effect pada alokasi pengeluaran, maka pemerintah diharapkan dapat seminimum mungkin memperkecil respon yang berlebihan pada belanja daerah.

Beberapa penelitian telah dilakukan guna menguji pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap belanja daerah. Beberapa juga menguji kecenderungan pemerintah daerah yang lebih menggantungkan diri pada dana transfer dari pemerintah pusat (Dana Alokasi Umum). Ferdian (2013) meneliti tentang pengaruh pendapatan asli

daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap belanja daerah pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa PAD, DAU, dan lain-lain pendapatan yang sah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah.

Wulansari (2015) melakukan penelitian tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah serta Analisis Flypaper Effect. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa PAD dan Dana Perimbangan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini konsisten dengan hasil penelitian Ferdinan. Penelitian Wulansari (2015) juga menunjukkan bahwa terdapat flypaper effect pada belanja pemerintah di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, hal ini terjadi karena pengaruh DAU terhadap belanja daerah lebih tinggi dibandingkan dengan pengaruh PAD terhadap belanja daerah.

Penelitian ini berfokus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan pertumbuhan perekonomian yang cukup pesat. Dalam kurun waktu 2001- 2012 rasio PAD terhadap belanja daerah rata-rata kurang dari 15%. Kecilnya proporsi PAD terhadap belanja daerah ini mengindikasikan kabupaten/kota di Jawa Timur belum maksimal dalam memanfaatkan sumber-sumber penghasil PAD, seperti peningkatan pajak daerah serta sumber daya alam lainnya. Ini dapat terjadi karena adanya kecenderungan pengharapan transfer dana dari pemerintah pusat, sehingga akan mengurangi kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhannya sendiri. Ketidakmampuan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan pendapatan melalui PAD sendiri menjadikan tuntutan kedepannya dalam menggali potensi fiskal melalui sektor pajak dan retribusi daerah yang mana potensial sebagai sumber PAD. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proporsi dana perimbangan dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah serta menunjukkan ada tidaknya flypaper effect di kabupaten/kota Jawa Timur Tahun 2017-2019.

Tinjauan Pustaka

Otonomi Daerah

Otonomi daerah dilaksanakan berdasarkan azas desentralisasi dengan tujuan untuk memudahkan pemerintah pusat untuk mengkoordinasi setiap daerah dalam pertumbuhan ekonomi dari daerah tersebut terutama dalam peningkatan atau penurunan PAD yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan otonomi daerah (Landiyanto, 2005).

Perimbangan Keuangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan pengertian tersebut, memiliki makna bahwa dana perimbangan merupakan inti dari hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah merupakan suatu system hubungan keuangan yang bersifat vertikal sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah

Pendapatan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal terdiri atas: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD); 2) Dana Perimbangan; dan 3) Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Dana Perimbangan

Indonesia saat ini masih mengalami beberapa permasalahan yang berkaitan dengan otonomi daerah seperti *fiscal gap* (celah fiskal) yang merupakan salah satunya. Celah fiskal terjadi dikarenakan adanya kondisi geografis dan kekayaan alam yang beragam serta defferensial potensi daerah. Menurut (Halim, 2009) Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari

penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah..

Belanja Daerah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah

Flypaper Effect

Istilah *Flypaper effect* diperkenalkan pertama kalinya oleh Courant (1974) dalam Iskandar (2012) untuk mengartikulasikan pemikiran Okun yang menyatakan “money sticks where it hits”. Sejauh ini, belum ada padanan kata “*flypaper effect*” dalam bahasa Indonesia sehingga kata ini dituliskan sebagaimana adanya tanpa diterjemahkan. Iskandar (2012) dikatakan bahwa *flypaper effect* merupakan suatu kondisi dimana stimulus terhadap pengeluaran daerah yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam jumlah transfer (*unconditional grants*) dari pemerintah pusat lebih besar dari yang disebabkan oleh perubahan dalam pendapatan asli daerah

Hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Daerah

Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah berpengaruh terhadap keuangan daerah yang mendorong dikeluarkannya sejumlah kebijakan terkait dengan transfer antar pemerintahan. Termasuk kebijakan desentralisasi fiskal, agar pemerintah daerah memiliki kewenangan yang semakin kuat dan luas untuk mengelola keuangan pemerintahannya dan meningkatkan kemampuan memperoleh sumber- sumber pendapatan.

Simanjuntak dalam (Siswanto, 2013) menjelaskan salah satu cerminan dari otonomi daerah adalah adanya kewenangan-kewenangan untuk menghimpun pendapatan dari pajak yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Namun, pendapatan asli daerah yang dihimpun oleh pemerintah kabupaten/kota hanya mampu membiayai 20% belanjanya. Rendahnya pencapaian PAD suatu daerah dapat menimbulkan resiko fiskal berupa tidak terpenuhinya seluruh kebutuhan daerah yang telah direncanakan dalam APBD daerah yang bersangkutan. Selain itu meningkatnya belanja daerah tanpa diikuti dengan kenaikan PAD yang signifikan menyebabkan adanya asimetris antara kebutuhan fiskal dan kapitalis fiskal daerah. Gap ini kemudian diharapkan dapat ditutupi oleh transfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Konsekuensinya beban pemerintah pusat menjadi semakin meningkat dan pemerintah daerah belum bisa meningkatkan kemandirian daerahnya.

Hubungan Dana Perimbangan dengan Belanja Daerah

Sumber penerimaan daerah setelah adanya otonomi daerah saat ini didominasi oleh bantuan dari pemerintah pusat baik dari DAU, DAK, dan DBH. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, tujuan DAU terutama adalah untu *horizontal equality* dan *sufficiency*. Tujuan *horizontal equity* adalah untuk mendistribusikan pendapatan secara adil dan merata serta tidak terjadi kesenjangan yang tinggi antar daerah. Tujuan *sufficiency* (kecukupan) adalah untuk menutup *fiscal gap*.

Damayanty (2013) menjelaskan formulasi perhitungan DAU sebagai program transfer yang berbasis pada rumus objektif masih memiliki berbagai keterbatasan yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan fiskal secara *horizontal*. Beberapa diantaranya adalah ‘disintensif’ bagi daerah yang berusaha meningkatkan PAD, serta ‘insentif’ bagi daerah yang memiliki belanja gaji PNSD tinggi.

Dengan demikian, semakin besar PAD maka kapasitas fiskal meningkat, celah fiskal menurun, dan berimbas pada menurunnya DAU. Hal tersebut tentunya tidak memberikan stimulus bagi daerah untuk berupaya meningkatkan PAD karena dapat mengandalkan DAU. Selanjutnya, bagi suatu daerah yang DAU nya lebih tinggi daripada PAD nya maka terjadi *flypaper effect*.

Metode Penelitian

Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi empiris di Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Desain penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah studi kausal, yang menyangkut hal-hal seperti sebab-akibat, kekuatan, sistem, dan ciri-ciri (Spillane, 2003). Unsur pokok dari sebab-akibat adalah bahwa variabel bebas menghasilkan variabel terikat atau variabel bebas menyebabkan variabel terikat terjadi. Penelitian ini dimaksud untuk mengetahui pengaruh dari PAD dan DAU pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Jenis data sekunder yang digunakan terdiri dari dua jenis data yaitu data berkala (time series) dan data kerat lintang (*cross section*).

Data berkala (time series) yaitu data yang didasarkan pada periode terjadinya atau dari waktu ke waktu, pada penelitian ini digunakan selama 8 tahun mulai 2017-2019. Data kerat lintang (cross section) adalah data pada tahun tertentu tapi daerahnya berbeda. Daerah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota. Sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah data laporan realisasi APBD dari tahun 2017-2019, yang bersumber dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) masing-masing Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur.

Objek Penelitian dan Prosedur Pengumpulan Data

Objek penelitian adalah suatu hal yang menjadi pokok penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah laporan realisasi APBD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur periode 2017-2019. Dalam prosedur pengumpulan data yang digunakan ada dua yaitu Riset Kepustakaan dengan cara pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan pebulisan penelitian ini melalui literature atau referensi kepustakaan seperti; ruang baca, Badan Pusat Statistik, serta berbagai sumber penerbitan seperti buku-buku ekonomi yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

Yang kedua adalah riset lapangan, dimana pengumpulan data dan informasi secara langsung diperoleh melalui instansi dan lembaga yang berhubungan dengan penelitian ini. Sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2017-2019.

Metode Analisis Data

Metode analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi linier berganda.

Model dan Analisis Data Panel

Regresi dengan menggunakan data panel disebut regresi data panel. Data panel (pooled data) adalah kombinasi dari jenis data runtut waktu (*time series*) dan kerat lintang (cross section). Apabila kedua informasi tersebut sudah tersedia, maka analisis data panel sudah bisa digunakan. Ketika dua jenis data tersebut digabungkan menjadi satu, maka jumlah observasi akan bertambah secara signifikan, tanpa melakukan treatment apapun terhadap data. Selain itu, kombinasi tersebut juga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas data dengan pendekatan yang tidak mungkin dilakukan dengan menggunakan hanya salah satu dari data tersebut (Gujarati, 2012). Formulasi regresi data panel untuk rumasan masalah pertama pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$BDit = \beta_0 + \beta_1 PADit + \beta_2 DAUit + \epsilon it$$

Dimana:

BD : Belanja Daerah
 PAD : Pendapatan Asli daerah
 DAU : Dana Alokasi Umum
 i : Cross Section
 t : Time Series
 β_0 : Konstanta
 e : error term

Uji t-Statistik

Uji t digunakan untuk menentukan sigifikansi variabel independen secara individual dalam mempengaruhi variabel dependen. Bila t_0 (t hitung) > t_1 (t tabel), maka hipotesis nol H_0 ditolak dan hipotesis alternative (H_1) diterima artinya model yang digunakan cukup baik dan dapat dikatakan bahwa variabel bebas dapat menerangkan variabel terikatnya. Pengujian t-statistik juga dapat dilakukan dengan melihat nilai probabilitas (uji p-value), apabila nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi (α) yang ditetapkan berada pada daerah H_1 diterima, maka koefisien parameter dalam model dinyatakan signifikan untuk digunakan.

Pengujian Flypaper Effect

Yaitu dengan cara membandingkan nilai DAU dengan PAD, jika nilai DAU > PAD maka menunjukkan adanya *Flypaper Effect*. Jika sebaliknya atau sama nilainya antara DAU dengan PAD maka tidak ada *Flypaper Effect*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

Deskripsi mengenai variabel penelitian yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Deskripsi Variabel Penelitian

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DAU	114	380779789000	1709892845000	914301900815.79	289594271806.70
DAK	114	.00	693917527000	128196050219.30	142226240642.75
PAD	114	59496296000	3839158392000	313800225666.67	556076107982.04
BD	114	292292723000	5566748436000	892598810385.97	745158681745.67
Valid N (listwise)	114				

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel 1 dapat dijelaskan:

1. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer yang bersifat umum dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk mengatasi ketimpangan horizontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Rata-rata nilai DAU untuk 29 Kabupaten dan 9 Kota di Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah sebesar Rp. 914,301,900,815.79.

2. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk

ECONOMIE

membayai kebutuhan belanja daerah. Rata-rata nilai DAK untuk 29 Kabupaten dan 9 Kota di Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah sebesar Rp. 128,196,050,219.30.

3. Pendapatan Asli Daerah

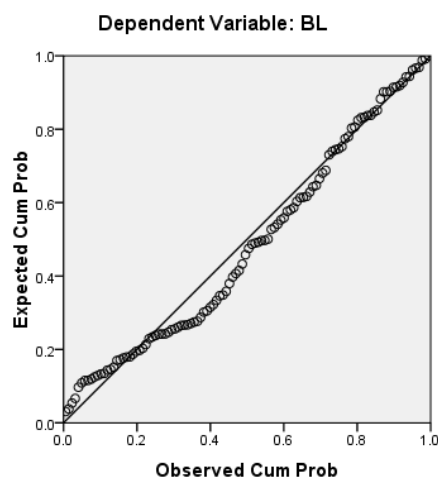
Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rata-rata nilai PAD untuk 29 Kabupaten dan 9 Kota di Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah sebesar Rp. 313,800,225,666.67.

d. Belanja daerah

Belanja daerah merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Rata-rata nilai belanja daerah untuk 29 Kabupaten dan 9 Kota di Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah sebesar Rp. 892,598,810,385.97.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas



Sumber: Data diolah, 2022

Gambar 1. Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik P-Plot

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

	Unstandardized Residual
N	114
Kolmogorov-Smirnov Z	1.010
Asymp. Sig. (2-tailed)	.259

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Data diolah, 2022

Hasil grafik plot normal dapat diketahui berada di sepanjang garis 45° , sedangkan berdasarkan Tabel 2 hasil uji normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test yaitu nilai signifikansi *Kolmogorov-Smirnov* pada *Asymp. Signifikansi* lebih besar dari 5% (0,05) yaitu sebesar 0,259 maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal, sehingga dapat digunakan dalam penelitian.

2. Uji Multikolinieritas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	8.821	1.518		5.810	.000		
DAU	.182	.068	.132	2.672	.009	.625	1.600
DAK	-.001	.005	-.009	-.218	.828	.921	1.086
PAD	.521	.032	.826	16.268	.000	.588	1.700

a. Dependent Variable: BD

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 3 terlihat bahwa nilai *tolerance* mendekati angka 1 dan nilai *variance inflation factor* (VIF) lebih rendah dari 10 untuk setiap variabel, maka hal ini berarti dalam persamaan regresi tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau bebas multikolinieritas, sehingga seluruh variabel independen (X) tersebut dapat digunakan dalam penelitian.

3. Uji Autokorelasi

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.913 ^a	.833	.829	.20437	.991

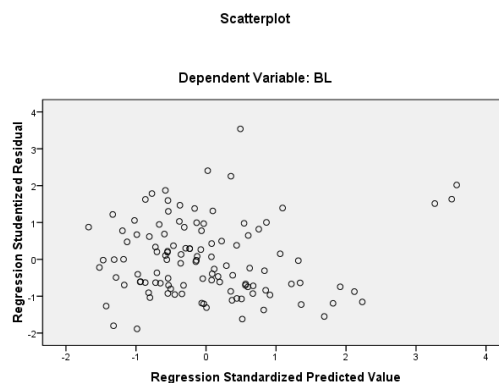
a. Predictors: (Constant), PAD, DAK, DAU

b. Dependent Variable: BD

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa pada model regresi tidak terjadi autokorelasi, yang mana ditunjukkan dengan $(-2 < 0,991 < 2)$.

4. Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data diolah, 2022

Gambar 2. Gambar Scatterplot

ECONOMIE

Berdasarkan grafik *scatterplot* di atas menunjukkan bahwa data tersebar diatas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y dan tidak terdapat suatu pola yang jelas pada penyebaran data tersebut. Hal ini juga bisa dilihat pada tabel uji glejser di bawah ini:

Tabel 5. Hasil uji Glejser
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.429	1.518		.283	.778
DAU	-.018	.068	-.032	-.269	.789
DAK	.000	.005	.006	.056	.956
PAD	.003	.032	.011	.086	.932

a. Dependent Variable: Unstandardized Residual

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi yang dihasilkan dari uji glejser semuanya di atas 0,05 jadi dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas masing-masing variabel. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model persamaan regresi. Setelah dilakukan uji asumsi klasik tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi linier dalam penelitian ini, bebas dari asumsi dasar (klasik) tersebut, sehingga pengambilan keputusan melalui uji F dan uji t yang akan dilakukan dalam penelitian ini tidak akan bias atau sesuai dengan tujuan penelitian.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 6. Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8.821	1.518		5.810	.000
DAU	.182	.068	.132	2.672	.009
DAK	-.001	.005	-.009	-.218	.828
PAD	.521	.032	.826	16.268	.000

a. Dependent Variable: BD

Sumber: Data diolah, 2022

$$BD = 8,821 + 0,182DAU - 0,001DAK + 0,521PAD$$

Hasil persamaan regresi linier berganda tersebut diatas memberikan pengertian bahwa:

1. Konstanta sebesar 8,821 menunjukkan bahwa jika Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) = 0 atau tidak ada, maka belanja daerah akan sebesar 8,821.
2. Koefisien regresi untuk variabel Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 0,182. Koefisien positif menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai hubungan searah dengan belanja daerah. Artinya apabila Dana Alokasi Umum (DAU) meningkat sebesar satu-satuan akan diikuti dengan meningkatnya belanja daerah sebesar 0,182 dengan asumsi variabel bebas yang lain dalam keadaan konstan.

ECONOMIE

3. Koefisien regresi untuk variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar -0,001. Koefisien negatif menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) mempunyai hubungan berlawanan arah dengan belanja daerah. Artinya apabila Dana Alokasi Khusus (DAK) meningkat sebesar satu-satuan akan menyebabkan penurunan terhadap belanja daerah sebesar 0,001 dengan asumsi variabel bebas yang lain dalam keadaan konstan.
4. Koefisien regresi untuk variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,521. Koefisien positif menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai hubungan searah dengan belanja daerah. Artinya apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat sebesar satu-satuan akan diikuti dengan meningkatnya belanja daerah sebesar 0,521 dengan asumsi variabel bebas yang lain dalam keadaan konstan.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 7. Nilai R dan R Square
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.913 ^a	.833	.829	.20437	.991

a. Predictors: (Constant), PAD, DAK, DAU

b. Dependent Variable: BD

Sumber: Data diolah, 2022

Hasil uji koefisien Determinasi dan koefisien korelasi berganda menunjukkan nilai R sebesar 0,913 Hal ini berarti bahwa hubungan atau korelasi antara faktor-faktor yang mempengaruhi belanja daerah adalah kuat karena $> 0,50$. Nilai *R Square* sebesar 0,833 atau 83,3%, ini menunjukkan bahwa variabel belanja daerah yang dapat dijelaskan variabel Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebesar 83,3%, sedangkan sisanya 16,7% dijelaskan faktor-faktor lain yang tidak disertakan dalam model penelitian ini.

Uji Hipotesis

Uji Statistik F (Simultan)

Tabel 8. Hasil Uji F
ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	22.976	3	7.659	183.376	.000 ^a
	Residual	4.594	110	.042		
	Total	27.571	113			

a. Predictors: (Constant), PAD, DAK, DAU

b. Dependent Variable: BD

Sumber: Data diolah, 2022

Dari Tabel 9 dapat dilihat bahwa nilai F_{hitung} dengan tingkat signifikansi 0,000 ($< 0,05$) sebesar 183,376. Berdasarkan tingkat signifikansinya, berarti variabel independen yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

Uji Statistik t (Parsial)Tabel 9. Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8.821	1.518		5.810	.000
DAU	.182	.068	.132	2.672	.009
DAK	-.001	.005	-.009	-.218	.828
PAD	.521	.032	.826	16.268	.000

a. Dependent Variable: BD

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan perhitungan uji regresi berganda yang tercantum pada Tabel 9, maka hasilnya memberikan pengertian bahwa :

1. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja daerah
Hasil perhitungan tabel 10, diperoleh nilai koefisien regresi bernilai positif dan nilai signifikansi untuk Dana Alokasi Umum (DAU) adalah $\alpha = 0,009 < 0,05$ menandakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Sehingga H_1 yang menyatakan dugaan adanya pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja daerah diterima..
2. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja daerah
Berdasarkan hasil perhitungan tabel 4.10, diperoleh nilai koefisien regresi bernilai positif dan nilai signifikansi untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah $\alpha = 0,828 > 0,05$ menandakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Sehingga H_2 yang menyatakan dugaan adanya pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja daerah ditolak.
3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja daerah
Berdasarkan hasil perhitungan tabel 4.10, diperoleh nilai koefisien regresi bernilai positif dan nilai signifikansi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah $\alpha = 0,000 < 0,05$ menandakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Sehingga H_3 yang menyatakan dugaan adanya pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja daerah diterima.

Pengujian *Flypaper Effect*

Pengujian dilakukan dengan cara membandingkan nilai DAU dengan PAD, jika nilai DAU > PAD maka menunjukkan adanya *Flypaper Effect*. Jika sebaliknya atau sama nilainya antara DAU dengan PAD maka tidak ada *Flypaper Effect*. Hasil uji rata-rata menunjukkan bahwa nilai rata-rata DAU sebesar Rp. 380.779.789.000 dan Nilai PAD sebesar Rp. 59.496.296.000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai DAU lebih besar dari nilai PAD (DAU > PAD), maka ada *Flypaper effect*.

Pembahasan

Penelitian ini menguji tentang pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja daerah.

1. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja daerah

Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,009 lebih kecil dari 0,05. Sehingga

dapat dikatakan bahwa variabel Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2010) yang meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap alokasi belanja daerah (studi Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah) berkesimpulan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap alokasi belanja daerah. Pemerintah daerah yang memiliki DAU tinggi maka pengeluaran untuk alokasi belanja daerahnya juga semakin tinggi. Melihat beberapa hasil penelitian telah menunjukkan bahwa DAU merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang di alokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sebagian daerah masih ada yang sangat bergantung terhadap dana transfer terhadap pemerintah pusat untuk menjalankan program kerjanya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah pusat memberikan Dana Alokasi Umum (DAU) kepada tiap-tiap daerah yang bertujuan untuk menanggulangi ketimpangan fiskal antar daerah yang di sebabkan minimumnya sumber pajak dan potensi alam yang berbeda-beda. Setelah diterapkannya desentralisasi fiskal, pemerintah pusat mengharapkan daerah dapat mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga tidak hanya mengandalkan DAU. Di beberapa daerah peran DAU sangat signifikan karena kebijakan belanja daerah lebih di dominasi oleh jumlah DAU daripada PAD. (Sidik, 2002)

2. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja daerah

Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar $0,828 > 0,05$. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Dwirandra (215) yang menemukan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hal yang sama juga dikatakan oleh Tuasikal (2008) Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan secara parsial terhadap belanja modal.

3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Sehingga hal ini berarti bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) menyimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di Pemerintah Daerah se Jawa-Bali baik Kabupaten dan Kota pada tahun 2004-2005. Susilawati (2013) meneliti tentang PAD dan DAU terhadap alokasi belanja daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur) berkesimpulan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap alokasi belanja daerah daerah.

Dengan adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diharapkan pemerintah daerah memiliki kemandirian sendiri dalam mengelola keuangannya. Dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan daerah. Penerimaan daerah tersebut dapat digunakan untuk membiayai kewajibannya dalam menjalankan pemerintahannya, termasuk untuk digunakan dalam meningkatkan infrastruktur daerah.

Kesimpulan

1) Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan uji F pada uji regresi linier berganda yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja daerah.
- b. Berdasarkan hasil uji t pada uji regresi linier berganda dapat diketahui
 1. Bahwa variabel Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah.
 2. Bahwa variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah.
 3. Bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah.
- c. Hasil uji rata-rata menunjukkan bahwa nilai rata-rata DAU sebesar Rp. 380.779.789.000 dan Nilai PAD sebesar Rp. 59.496.296.000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai DAU lebih besar dari nilai PAD (DAU > PAD), maka ada *Flypaper effect*.

2) Saran

Saran yang bisa diberikan antara lain adalah Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian di luar variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini, misalnya Tingkat pendapatan dari sektor pajak yang dapat digunakan untuk meningkatkan belanja daerah, mengingat terdapat pengaruh sebesar 6,7% dari variabel lain yang tidak diikuti sertakan dalam penelitian ini

DAFTAR PUSTAKA

- Damayanty, S. A. (2013). *Menelisik Kemampuan Keuangan Daerah*. Solo: PT Era Adicitra Intermedia
- Darwanto dan Yustikasari, Y. (2007). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD dan DAU Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X Makasar*. Makasar
- Ferdian (2013). Pengaruh BOPO, LDR, NPM, dan Ukuran perusahaan Terhadap Profitabilitas. *Jurnal Universitas Pandanaran Semarang*. 1(2): 1-11.
- Gujarati, D. (2012). *Dasar-Dasar Ekonometrika Edisi Kedua*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2009). *Akuntansi sector Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat
- Putra, I. B. D., dan Dwirandra, A. A. N. B. (2015). Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali. *e-Jurnal akuntansi Universitas Udayana*. (13(3): 1-12.
- Iskandar (2012). Flypaper Effect pada Unconditional Grants. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 13(1): 1-9.
- Kuncoro, H. (2007). Fenomena Flypaper Effect Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi X*, 26 - 28.

- Landiyanto, E. A. (2005). Kinerja Keuangan dan Strategi Pembangunan Kota di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Surabaya. *Cures Working Paper*, No. 05/01.
- Mardiasmo (2002). *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Rahmawati, N. I. (2010). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang. Diakses dari <https://core.ac.uk/download/pdf/11721633.pdf> pada 20 Januari 2022
- Sidik. (2002). *Dana Alokasi Umum-Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Siswanto, A. (2013). Identifikasi Sumber-Sumber Risiko Fiskal Daerah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 5(1): 231-240.
- Spillane, J. J. (2003). *Pariwisata dan Wisata Budaya*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Susilawati (2013). PAD dan DAU terhadap alokasi belanja daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur) berkesimpulan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap alokasi belanja daerah daerah. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STESIA). Surabaya. Diakses dari <http://jurnalmahasiswa.stesia.ac.id/index.php/jira/article/download/1646/1672/> pada 20 Januari 2022.
- Tasri, A. (2018). The Flypaper Effect Phenomenon: Evidence from Indonesia. *European Journal of Engineering and Formal Sciences*. 2(1), page 20-24.
- Tresch, R. (2002). *Finance Public Anormative Theory*. Department of Economic, Boston College Chestnut Hill, Massachusetts.
- Tuasikal, A. (2008). Pengaruh DAU, DAK, dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*. 1(2): 142-155.
- Wulansari, D. T. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah serta Analisis Flypaper Effect. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Diakses pada <http://eprints.ums.ac.id/37252/13/02.%20Naskah%20Publikasi.pdf>. pada 20 Januari 2022.